

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYAH KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan kerjasama dari semua pihak yang terkait di lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Triwulan I Tahun 2023 ini dapat disusun.

Laporan Kinerja (LKj) Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Triwulan I Tahun 2023 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Triwulan I Tahun 2023 yang tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian Perikanan Budidaya. LKj Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Triwulan I Tahun 2023 ini mencakup Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok menyesuaikan dengan DJPB KKP berikut pencapaian IKU melalui serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2023 oleh masing-masing kelompok kerja yang ada di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.

LKj Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Triwulan I Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, LKj Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Triwulan I Tahun 2023 dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan yang berguna bagi masyarakat.

Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna untuk menunjang pembangunan perikanan budidaya di masa mendatang.

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK

Lombok Barat, 18 April 2023

ayan Sofyan, A.Pi,M.P.

Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKTUIF	8
BAB 1. PENDAHULUAN	12
1.1.LATAR BELAKANG	12
1.2.MAKSUD DAN TUJUAN	12
1.3.TUGAS DAN FUNGSI	12
1.4.ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA	
1.5.SISTEMATIKA LKJ	16
BAB 2.PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	18
2.1.RENCANA STRATEGIS BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK TAHUN 2020-2024	18
2.1.1.VISI	8
2.1.2.MISI	18
2.1.3.TUJUAN	18
2.1.4.SASARAN KEGIATAN	19
2.1.5.STRATEGI DAN KEBIJAKAN	20
2.2. RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN	22
2.3.PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	23
2.4.PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023	24
BAB 3.AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1.CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	26
3.2.ANALISIS CAPAIAN KINERJA	32
3.3.CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	72
3.4.EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	72
RAR / DENITTID	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2023	26
Tabel 2. Nilai PNBP BPBL Lombok	33
Tabel 3. Persentase bantuan sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang terdistribusi berdasarka	n
usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	35
Tabel 4. Bantuan benih yang didistribusikan ke masyarakat	37
Tabel 5. Persentase Bantuan Benih yang Terdistribusi berdasarkan Usulan Masyarakat Lingkup Bal	ai
Perikanan Budidaya Laut Lombok	38
Tabel 6. Persentase bantuan calon induk yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingku	p BPBL
Lombok	39
Tabel 7.Capaian produksi calon induk unggul	
Tabel 8. calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi	41
Tabel 9. perbandingan prosentase capaian calon induk unggul ikan laut yang diproduksi	41
Tabel 10. Keberhasilan teknologi komoditas unggulan yang dikembangkan lingkup BPBL Lombok	42
Tabel 11. Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate di UPT Lingkup BPBL Lombe	ok 43
Tabel 12. perbandingan prosentase capaian Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala	
intermediate	44
Tabel 13. Persentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan ke masyarakat	45
Tabel 14. Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat	47
Tabel 15. Keberhasilan teknologi komoditas unggulan yang dikembangkan lingkup BPBL Lombok	48
Tabel 16. Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias yang disalurkan ke masyarakat	49
Tabel 17. Realisasi Jumlah sampel yang diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ika	n dan
Lingkungan	50
Tabel 18 Persentase sampel kesehatan ikan dan lingkungan yang diuji dalam rangka pelayanan la	
Tabel 19. Perbandingan prosentase capaian jumlah sampel lab kesling UPT Laut	
Tabel 20. Realisasi Jumlah sampel AMR	53
Tabel 21. Persentase sampel antimikrobial resistance (AMR) yang diuji Laboratorium Kesehatan Ik	
dan Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	
Tabel 22. Perbandingan prosentase capaian jumlah sampel AMR UPT Laut	
Tabel 23. Indeks profesionalitas ASN lingkup satker BPBL Lombok	
Tabel 24. Hasil penilaian pembangunan ZI menuju WBK di Satker BPBL Lombok	
Tabel 25. Prosentase penyelesaian LHP BPK BPBL Lombok	
Tabel 26. Nilai Rekon SAKIP lingkup Satker BPBL Lombok	
Tabel 27. Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan l	•
lingkup satker BPBL Lombok	
Tabel 28. Perbandingan prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan	
Tabel 29. Prosentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar	
Tabel 30	
Tabel 31. Nilai IKPA Satker BPBL Lombok	
Tabel 32. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker BPBL Lombok	
Tabel 33. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa	
Tabel 34. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkup Satker BPBL Lombok	67

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2023 BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK

Tabel 35. Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi	. 68
Tabel 36. Indeks Pengelolaan kepegawaian	. 69
Tabel 37. Nilai Pengawasan kearsipan	. 70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Perikanan Budidaya Laut Tahun 2023	14
Gambar 2. Grafik jumlah pegawai BPBL Lombok berdasarkan jabatan per Maret 2023	14
Gambar 3. Grafik jumlah pegawai BPBL Lombok berdasarkan tingkat pendidikan per Maret 2023	15
Gambar 4. Grafik jumlah pegawai BPBL Lombok berdasarkan pangkat/gol per Maret 2023	15
Gambar 5. Perjanjian kinerja Tahun 2023	24
Gambar 6. Screenshot aplikasi kinerjaku	25
Gambar 7. Realisasi PNBP Tahun 2023	33
Gambar 8. Survey dan Identifikasi KBRL ke masyarakat	35
Gambar 9. Dokumentasi penyerahan bantuan Benih Ikan Laut yang disalurkan ke masyarakat	38
Gambar 10. Pemeliharaan mikropropagul	43
Gambar 11. Kegiatan Identifikasi dan verifikasi	45
Gambar 12. Kegiatan diseminasi teknologi	46
Gambar 13. Inokulasi bakteri dari sampel ke media MHA	54
Gambar 14. Screenshot aplikasi OMSPAN	71

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKJ) ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas perjanjian kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok yang memuat rencana, capaian dan realisasi anggaran dan kegiatan BPBL Lombok pada Triwulan I Tahun 2023. Berdasarkan Surat Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (BPBL Lombok) dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2023, maka telah ditetapkan target kinerja yang harus dicapai oleh satker BPBL Lombok terdiri dari 4 (empat) Sasaran Kegiatan dengan 26 (dua puluh enam) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Ringkasan penjelasan pencapaian IKU dalam setiap Sasaran Strategis sebagaimana berikut :

Sasaran Kegiatan 1, yaitu: "Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat pada Wilayah kerja BPBL Lombok "didukung oleh 1 (satu) IKU yaitu: (i) Nilai PNBP Satuan Kerja BPBL Lombok Sasaran Kegiatan 2, yaitu: "Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan" didukung oleh 11 (sebelas) IKU, yaitu : (i) Persentase Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (ii) Persentase bantuan benih yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (iii) Persentase bantuan calon induk yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (iv) Produksi calon induk unggul di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (v) Persentase keberhasilan teknologi komoditas unggulan yang dikembangkan lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (vi) Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate di UPT lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (vii) Persentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan ke masyarakat (viii) Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat (ix) Prosentase Model Usaha Budidaya Komoditas Unggulan yang Dikembangkan oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (x) Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias yang disalurkan ke masyarakat

Sasaran Kegiatan 3, yaitu : "Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya bidang Kawasan dan Kesehatan ikan" didukung oleh 2 (dua) IKU yaitu: (i) Persentase sampel Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan

Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok; (ii) Persentase sampel antimikrobial resistance (AMR) yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Sasaran Kegiatan 4, yaitu : "Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok" didukung oleh 13 (tiga belas) IKU yaitu (i) Indeks profesionalitas ASN lingkup BPBL Lombok; (ii) Hasil penilaian pembangunan ZI menuju WBK di satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok; (iii) prosentase penyelesaian LHP BPK satker BPBL Lombok; (iv) Nilai rekon kinerja BPBL lombok; (v) Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPBL Lombok yang dokumen tindak lanjutnya telah tuntas; (vi) prosentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar; (vii) nilai IKPA lingkup satker BPBL Lombok; (viii) NKA lingkup satker BPBL lombok, (ix) Tingkat kepatuhan pengadaan Barang dan Jasa lingkup satker BPBL Lombok, (x) Tingkat kepatuhan Pengelolaan barang milik negara lingkup satker BPBL Lombok, (xi) Persentase Pelaku Usaha perikanan Budidaya yang terintegrasi dengan data KUSUKA, (xii) Indeks Pengelolaan kepegawaian, (xiii) Nilai Pengawasan Kearsipan.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, dari 26 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 6 (Enam) Indikator kinerja yang mencapai target yang telah ditentukan pada Triwulan I Tahun 2023, yaitu :

- 1. Nilai PNBP BPBL Lombok sebesar Rp. 171.099.708 dari target Rp 100.000.000;
- 2. Produksi Calon Induk Unggul di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sebanyak 65 ekor dari target 0 ekor;
- 3. Persentase sampel Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sebesar 26,53% dari target 25%;
- 4. Persentase sampel antimikrobial resistance (AMR) yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sebesar 25,49% dari target 25%;
- Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sebesar 100% dari target 75%;
 dan
- 6. Prosentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sebesar 100% dari target 92%.

Sementara terdapat 20 (Dua puluh) indikator yang belum bisa dihitung pada Triwulan I Tahun 2023, yaitu :

- 1. Persentase Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok;
- 2. Persentase bantuan benih yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok;
- 3. Persentase bantuan calon induk yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok;
- 4. Persentase keberhasilan teknologi komoditas unggulan yang dikembangkan lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok;
- 5. Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate di UPT lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok;
- 6. Persentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan ke masyarakat;
- 7. Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat;
- 8. Prosentase Model Usaha Budidaya Komoditas Unggulan yang Dikembangkan oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok;
- 9. Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias yang disalurkan ke masyarakat;
- 10. Indeks profesionalitas ASN lingkup BPBL Lombok;
- 11. Hasil penilaian pembangunan ZI menuju WBK di satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok;
- 12. prosentase penyelesaian LHP BPK satker BPBL Lombok;
- 13. Nilai rekon kinerja BPBL lombok;
- 14. nilai IKPA lingkup satker BPBL Lombok;
- 15. NKA lingkup satker BPBL lombok;
- 16. Tingkat kepatuhan pengadaan Barang dan Jasa lingkup satker BPBL Lombok;
- 17. Tingkat kepatuhan Pengelolaan barang milik negara lingkup satker BPBL Lombok;
- 18. Persentase Pelaku Usaha perikanan Budidaya yang terintegrasi dengan data KUSUKA;
- 19. Indeks Pengelolaan kepegawaian;
- 20. Nilai Pengawasan Kearsipan.

Berdasarkan Hasil evaluasi kinerja Triwulan I Tahun 2023, dapat diketahui bahwa BPBL Lombok telah mencapai target yang ditentukan pada Triwulan I, meskipun demikian BPBL Lombok akan tetap meningkatkan kinerjanya dengan memperhatikan target-target yang ditentukan pada periode mendatang untuk dapat mengoptimalkan pencapaian Indikator Kinerja Utama.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri KP No. 67/MEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya mempunyai tugas yaitu melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi di bidang perikanan budidaya laut, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan guna mendukung berbagai program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan.

Berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun rencana kerja tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

Atas dasar hal-hal tersebut, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sebagai salah satu UPT Ditjen Perikanan Budidaya telah melakukan penyusunan target kinerja Tahun 2023, dan dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, dan kemudian dituangkan dalam LKj Triwulan I Tahun 2023. LKj BPBL Lombok ini menginformasikan *input, output, outcome, dan benefit* dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu Triwulan I Tahun 2023.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Penyusunan LKj BPBL Lombok Triwulan I Tahun 2023 yaitu: (i) sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi BPBL Lombok kepada seluruh *stakeholders;* (ii) sebagai sarana monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja BPBL Lombok Triwulan I Tahun 2023; dan (iii) sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.3. Tugas dan Fungsi

BPBL Lombok bertugas melaksanakan uji terap teknik dan kerjasama, produksi, pengujian laboratorium kesehetan ikan dan lingkungan serta bimbingan teknis perikanan budiaya laut, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor Nomor 32 Tahun 2021 tentang

perubahan atas Peraturan Menteri KP No. 67/MEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya yang diuraikan lebih rinci dalam fungsi sebagai berikut:

- 1. Penyusunan, pemantauan,dan evaluasi rencana, program,dan anggaran, serta pelaporan di bidang perikanan budidaya laut;
- 2. pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya laut;
- 3. pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi perikanan budidaya laut;
- 4. pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya laut;
- 5. pelaksanaan kerja sama teknis perikanan budidaya laut;
- 6. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya laut;
- 7. pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya laut;
- 8. pelaksanaan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya laut;
- pelaksanaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya laut;
- 10. pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya laut; dan
- 11. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, berdasarkan peraturan menteri tersebut, susunan organisasi BPBL Lombok terdiri dari :

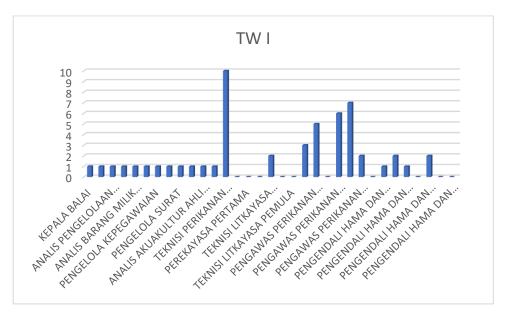
- Subbagian Umum, yang mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.
- 2. Kelompok jabatan fungsional, yang mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Susunan organisasi BPBL Lombok tergambar pada susunan organisasi di bawah ini:

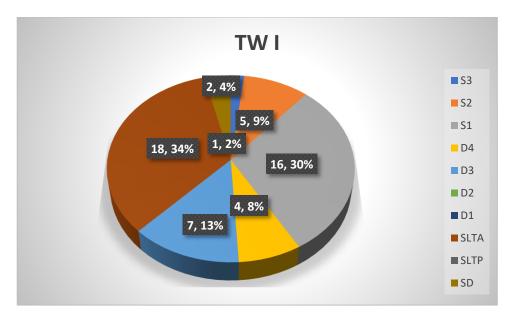


Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Perikanan Budidaya Laut Tahun 2023

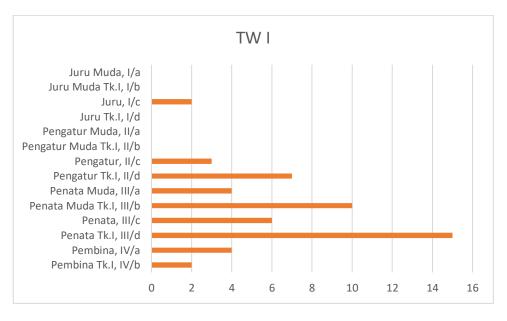
Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok didukung oleh SDM sejumlah 78 orang dengan rincian sejumlah 53 orang ASN dan sejumlah 24 orang tenaga kontrak dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 2. Grafik jumlah pegawai BPBL Lombok berdasarkan jabatan per Maret 2023



Gambar 3. Grafik jumlah pegawai BPBL Lombok berdasarkan tingkat pendidikan per Maret 2023



Gambar 4. Grafik jumlah pegawai BPBL Lombok berdasarkan pangkat/gol per Maret 2023

1.4. Isu Strategis (Strategic Issued) dan Permasalahan Utama

1.4.1. Isu Strategis Pengembangan Budidaya Laut

Budidaya laut (*Marine Culture*) di Indonesia merupakan bagian dari sektor kelautan dan perikanan yang mempunyai kontribusi penting dalam memenuhi target produksi perikanan. Potensi sumber daya perikanan budidaya laut khususnya di Propinsi NTB dimanfaatkan untuk kegiatan pengembangan komoditas-komoditas yang memiliki nilai ekonomis penting, diantaranya: rumput laut, mutiara, lobster, kerapu, kakap dan bawal bintang (Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi NTB). Lebih lanjut lagi data statistik perikanan budidaya di

Propinsi NTB diketahui pada tahun 2021, potensi areal budidaya laut seluas 171.010,51 hektar dengan jumlah Rumah Tangga Produksi berjumlah 10.033 unit.

Dalam pengembangan budidaya laut di wilayah tengah dan timur Indonesia (Bali, NTT, dan Papua) khususnya di propinsi NTB yang menjadi wilayah kerja BPBL Lombok terdapat beberapa isu dan permasalahan yang dihadapi, antara lain: (i) harga pakan untuk komoditas ikan laut sangatlah tinggi (pakan segar dan pakan buatan); (ii) penyakit; (iii) akses permodalan yang terbatas karna ketidak stabilan produksi dan resiko kegagalan yang tinggi; (iv) standar kompetensi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih perlu ditingkatkan; (v) tingkat kelulushidupan (SR) biota yang dipelihara saat panen yang masih rendah karena berbagai macam faktor mulai dari lingkungan budidaya, tidak konsistennya penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) hingga kualitas benih yang masih rendah dari segi pertumbuhan.

Selain permasalahan tersebut diatas juga terdapat beberapa tantangan yang dihadapi BPBL Lombok dalam pengembangan budidaya ikan air laut, diantaranya: (i) pengembangan teknologi budidaya dari jenis kekerangan, ikan bersirip dan juga lobster yang bernilai ekonomis tinggi belum optimal dilakukan; (ii) keterbatasan sarana prasarana, anggaran, dan SDM; dan (iii) wilayah kerja yang sangat luas.

1.4.2. Permasalahan Utama Pencapaian Indikator Kinerja Utama di BPBL Lombok

Secara umum, permasalahan-permasalahan/ kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian semua program prioritas pada Triwulan I Tahun 2023 di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, diantaranya:

- Adanya kebijakan bantuan benih dan bantuan calon induk air tawar di BPBL Lombok yang sampai triwulan I belum ada kegiatan yang dilaksanakan;
- 2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Pengadaaan Barang dan Jasa (PBJ) yang hanya berjumlah 3 orang dirasa masih sangat kurang untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam rangka pengoptimalisasian pencairan anggaran;
- Kendala adanya kebijakan TKDN pada Tahun 2023 sehingga proses pengadaan beberapa barang seperti pakan benih ikan dan juga bahan kimia mengalami keterlambatan karena terkendala di pengurusan P3DN karena merupakan barang impor

1.5. Sistematika LKj

LKj ini secara umum memuat target dan capaian kinerja Balai Perikanan Budiaya Laut Triwulan I Tahun 2023 . LKj ini menginformasikan perbandingan

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2023 BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK

antara target dan capaian kinerja (*performance results*) Triwulan I Tahun 2023 dengan target dan kinerja pada tahun sebelumnya. Dari analisa tersebut akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*Performance gap*) sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut :

- 1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja BPBL Lombok Triwulan I Tahun 2023 , permasalahan yang dihadapi, dan upaya mengatasi hal tersebut.
- 2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang BPBL Lombok serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi BPBL Lombok, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
- 3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini disajikan tapja yang memuat sasaran kegiatan berikut indikator kinerja utama (IKU) pada Triwulan I Tahun 2023 .
- 4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini disajikan rincian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBL Lombok serta evaluasi dan analisis kinerja. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang efisiensi.
- 5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama.

BAB 2. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK TAHUN 2020 – 2024

2.1.1. Visi

Visi Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sejalan dengan visi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yaitu: "Terwujudnya masyarakat perikanan budidaya yang sejahtera dan sumber daya perikanan budidaya yang berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

2.1.2. Misi

Misi yang akan dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sejalan dengan misi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yaitu :

- Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan budidaya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional.
- 2. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja DJPB di pusat dan daerah.

2.1.3. Tujuan

Tujuan pembangunan perikanan budidaya yaitu:

- 1. Peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan budidaya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya;
 - b. Mengoptimalkan pengelolaan kawasan perikanan budidaya secara berkelanjutan;
 dan
- 2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan.
- 3. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di UPT BPBL Lombok, yakni meningkatkan kinerja reformasi birokrasi sebagai UPT Dirketorat Jenderal Perikanan Budidaya.

2.1.4. Sasaran Kegiatan

Tujuan strategis pembangunan perikanan budidaya laut akan dicapai melalui sejumlah sasaran kegiatan yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada Triwulan I Tahun 2023 .

Sasaran Kegiatan pembangunan perikanan budidaya berdasarkan tujuan yang akan dicapai dijabarkan dalam lima perspektif dengan masing-masing IKU sebagai berikut :

- 1. Ekonomi sektor budidaya meningkat pada Wilayah Kerja BPBL Lombok dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran kegiatan ini adalah Nilai PNBP Satuan Kerja BPBL Lombok
- 2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran kegiatan ini adalah :
 - a. Persentase Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok;
 - Persentase bantuan benih yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai
 Perikanan Budidaya Laut Lombok ;
 - c. Persentase bantuan calon induk yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok;
 - d. Produksi calon induk unggul di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok;
 - e. Persentase keberhasilan teknologi komoditas unggulan yang dikembangkan lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok;
 - f. Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate di UPT lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok ;
 - g. Persentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan ke masyarakat;
 - h. Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat;
 - i. Prosentase Model Usaha Budidaya Komoditas Unggulan yang Dikembangkan oleh Balai
 Perikanan Budidaya Laut Lombok;
 - j. Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias yang disalurkan ke masyarakat
- 3. Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya bidang Kawasan dan Kesehatan ikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran kegiatan ini adalah:

- a. Persentase sampel Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok;
- b. Persentase sampel antimikrobial resistance (AMR) yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok .
- 4. Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran kegiatan ini adalah :
 - a. Indeks profesionalitas ASN lingkup BPBL Lombok
 - b. Hasil Penlaian Pembangunan ZI menuju WBK di satker BPBL Lombok;
 - c. prosentase penyelesaian LHP BPK satker BPBL Lombok
 - d. Nilai rekon kinerja BPBL lombok
 - e. Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPBL Lombok yang dokumen tindak lanjutnya telah tuntas
 - f. prosentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar;
 - g. nilai IKPA lingkup satker BPBL Lombok;
 - h. NKA lingkup satker BPBL lombok,
 - Tingkat kepatuhan pengadaan Barang dan Jasa lingkup satker BPBL lombok;
 - j. Tingkat kepatuhan Pengelolaan barang milik negara lingkup satker BPBL Lombok;
 - k. Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan data KUSUKA;
 - I. Indeks pengelolaan kepegawaian;
 - m. Nilai Pengawasan Kearsipan;

2.1.5. Strategi dan Kebijakan

Strategi BPBL Lombok untuk berkontribusi langsung mengambil bagian untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya Tahun 2020-2024 adalah dengan mengimpelmentasikan kegiatan-kegiatan prioritas DJPB sebagai berikut :

- a. Aspek sosial ekonomi:
 - Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya, dilaksanakan dengan komponen kegiatan prioritas sebagai berikut:
- Penyaluran bantuan induk unggul dan benih bermutu kepada kelompok pembudidaya untuk menghidupkan 20

kembali usaha budidaya skala kecil, serta mengoptimalkan fungsi UPT dan UPTD serta unit pembenihan masyarakat untuk membantu kontinuitas usaha kelompok penerima bantuan tersebut;

- Penyaluran bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok pembudidaya, antara lain bibit/benih, pakan, obat ikan dan vitamin, pupuk serta peralatan, sebagai upaya stimulasi pengembangan usaha pembudidayaan ikan;
- Pengembangan kebun bibit rumput laut melalui pemberian bantuan bibit bermutu di kawasan sentra kebun bibit rumput laut.

b. Aspek teknologi produksi:

Meningkatkan produktivitas, daya saing ekonomi serta pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan budidaya, dilaksanakan dengan komponen kegiatan prioritas sebagai berikut:

- Pengembangan kawasan perikanan budidaya (minapolitan) dengan mengintegrasikan rantai produksi dari hulu sampai hilir untuk efisiensi produksi;
- Peningkatan kualitas induk dan benih melalui sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) untuk menghasilkan unit pembenihan bersertifikat;
- Pelaksanaan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) untuk menghasilkan pembudidaya (pembesaran ikan) bersertifikat;
- Pengembangan Kebun Bibit Rumput Laut dengan sistem Kultur Jaringan
- Peningkatan kuantitas dan kualitas ikan non konsumsi (ikan hias, karang buatan, tanaman hias dll);
- Pengembangan sentra budidaya baru berbasis kawasan/klaster, dimana salah satu gebrakan KKP adalah pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau-pulau terluar Indonesia. Dalam hal ini, Ditjen Perikanan Budidaya ditugaskan untuk mengawal 3 kawasan SKPT, yaitu Sabang, Rote Ndao, dan Sumba Timur.
- Pelaksanaan budidaya lele sistem bioflok, yaitu teknologi budidaya lele intensif dengan mengandalkan suplai oksigen dan gumpalan (flok) mikroorganisme tertentu. Untuk tahap awal, fokus kegiatan bioflok dilakukan di pesantren, untuk kemudian diperluas ke wilayah lain. Tujuan bioflok adalah meningkatkan ketahanan pangan, memenuhi gizi protein santri, meningkatkan konsumsi makan ikan masyarakat, meningkatkan pendapatan serta perekonomian pesantren dan masyarakat
- Pengembangan sarana input produksi inovatif di UPT Pusat, misalnya

protein rekombinan, vaksin, enzim, probiotik, immunostimulan, rekayasa genetik, automatic feeder, karamba bulat, dll.

c. Aspek sumber daya alam dan lingkungan:

Mewujudkan kelestarian dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya, dilaksanakan dengan komponen kegiatan prioritas sebagai berikut:

- Penerapan perekayasaan teknologi budidaya yang efisien dan ramah lingkungan dan sesuai dengan daya dukung;
- Pengembangan Culture Based Fisheries (CBF) dengan pendekatan komoditas multitrophic level.
- Pengembangan komoditas ikan spesifik lokal unggulan dan species ikan tahan perubahan lingkungan;
- Pengendalian plasma nutfah induk dan benih;

2.2. RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN

Pelaksanaan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok pada Triwulan I Tahun 2023 difokuskan pada program pencapaian Indikator Kinerja Utama yaitu :

- 1. Pengelolaan perbenihan ikan
- 2. Pengelolaan kawasan dan kesehatan ikan
- 3. Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan
- 4. Dukungan manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

Dimana dalam mencapai hal tersebut, telah didistribusikan melalui Klasifikasi Rincian Output yaitu: (i) Bantuan peralatan/sarana; (iii) Bantuan hewan; (iv) Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan; (v) Penyidikan dan Pengujian Penyakit; (vi) Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan; (vii) Sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi; (viii) Layanan dukungan manajemen internal; (ix) layanan manajemen SDM internal; (x) layanan manajemen kinerja internal.

Dalam mendukung rencana kerja tersebut, BPBL Lombok mendapatkan pagu anggaran berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 sebesar Rp. 25.088.141,000-(Dua Puluh Lima Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah). Berikut adalah nilai pagu berdasarkan kegiatan :

- a. Pengelolaan perbenihan ikan sebesar Rp. 5.910.866.000
- b. Pengelolaan kawasan dan kesehatan ikan sebesar Rp. 622.718.000

- c. Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan sebesar Rp. 7.315.000.000
- d. Dukungan manajemen internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya sebesarRp. 11.239.557.000

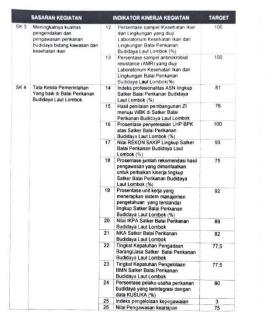
2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen anatara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, penetapan kinerja BPBL Lombok tahun 2023. Berikut adalah perjanjian kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Tahun 2023.



	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
SK 1	Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya meningkat di Wilayah Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	1	Nilai PNBP Satuan Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Rp)	762 305 000
SK 2 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	2	Persentase bantuan sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	75	
		3	Persentase bantuan benih yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	100
		4	Persentase bantuan calon induk yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	100
		5	Produksi calon induk unggul di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok(ekor)	1.400
		6	Persentase keberhasilan teknologi komoditas unggulan yang dikembangkan lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	100
		7	Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate di UPT lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (planlet)	3.000
	8	Persentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan ke masyarakat (%)	100	
		9	Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat (%)	100
		10	Prosentase Model Usaha Budidaya Komoditas Unggulan yang Dikembangkan oleh Balai Perikanan	100

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK



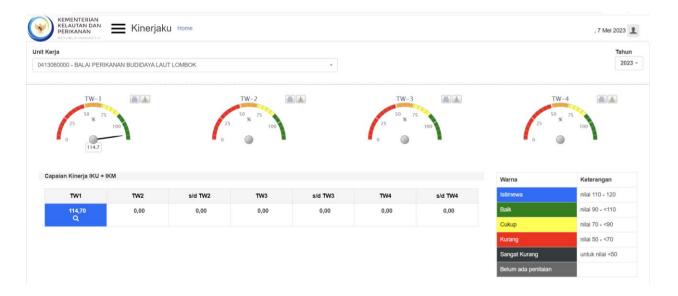


Gambar 5. Perjanjian kinerja Tahun 2023

2.4. PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah dtetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan implementasi aplikasi BSC "kinerjaku" yang merupakan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berbasis informasi teknologi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian rata-rata Indikator Kinerja Utama (IKU)+IKM Pada Triwulan I Tahun 2023 ini adalah sebesar 114,70 % atau masuk dalam kategori ISTIMEWA (Biru). Berikut adalah hasil hasil *Screenshot* dari aplikasi Kinerjaku BPBL Lombok.



Gambar 6. Screenshot aplikasi Kinerjaku

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, berdasarkan sistem aplikasi Kinerjaku, diperoleh Nilai sebesar 114,70% adapun rekapitulasi capaian kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok pada Triwulan I Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2023

			Target			
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN (2023)	TAHUNAN		Realisasi Tehadap Target TW I (%)	Realisasi terhadap Target 2023 (%)
Ekonomi Sektor perikanan budidaya meningkat di wilayah kerja BPBL Lombok	Nilai PNBP Satuan Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Rp)	762,305,000	100,000,000	171,099,708	171.10	22.45
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase bantuan sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	75	-	0	0	0
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase bantuan benih yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	100	0	0	0	0

Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase bantuan calon induk yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	100	0	0	0	0
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Produksi calon induk unggul di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok(ekor)	1,400	-	65	0	4.64
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase keberhasilan teknologi komoditas unggulan yang dikembangkan lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	100	-	0	0	0
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate di UPT lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (planlet)	3,000	0	0	0	0
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan ke masyarakat (%)	100	-	0	0	0

				_	_	
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat (%)	100	-	0	0	0
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Prosentase Model Usaha Budidaya Komoditas Unggulan yang Dikembangkan oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	100	-	0	0	0
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias yang disalurkan ke masyarakat (%)	100	-	0	0	0
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang Kawasan Dan Kesehatan Ikan	Persentase sampel Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	100	25	26.53	106	26.53

Meningkatnya Kualitas Pengendalian Dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang Kawasan Dan Kesehatan Ikan	Persentase sampel antimikrobial resistance (AMR) yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok(%)	100	25	25	102	25.49
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Indeks profesionalitas ASN lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	81	-	0	0	0
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Hasil penilaian pembangunan ZI menuju WBK di Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	76	-	0	0	0
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Persentase penyelesaian LHP BPK atas satker BPBL Lombok (%)	100	-	0	0	0
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Nilai REKON SAKIP Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	93	-	0	0	0

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	75	75	100	133.33	133.33
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Prosentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	92	92	100	108.70	108.70
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Nilai IKPA Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	89		0	0	0
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	NKA Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	82	-	0	0	0
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	77.5	-	0	0	0

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	77.5	-	0	0	0
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan data KUSUKA (%)	80	-	0	0	0
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Indeks pengelolaan kepegawaian	3	-	0	0	0
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Nilai Pengawasan kearsipan	75	-	0	0	0

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1:

Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat lingkup BPBL Lombok

1. Nilai PNBP Satuan Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. PNBP BPBL Lombok diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2022 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana Nilai PNBP BPBL Lombok berasal dari pendapatan yang dihitung dari penerimaan umum, penerimaan fungsional, dan penerimaan lain-lain.

Pada Tahun 2022, permasalahan BPBL Lombok adalah BPBL Lombok tidak dapat mencapai target PNBP sebesar 100% namun hanya sebesar 99,33% karena terbatasnya serapan pasar atas ikan konsumsi yang diproduksi oleh BPBL Lombok sehingga pada Tahun 2023 ini BPBL Lombok menambah komoditas lainnya untuk meningkatkan penerimaan negara melalui komoditas lobster.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, BPBL Lombok berdasarkan surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor B. 2803/DJPB.1/KU.340/IV/2023 tanggal 11 April 2023, capaian PNBP BPBL Lombok adalah Rp 171.099.708 atau 171,10% dari target Triwulan I Tahun 2023 atau 22,45% dari target Tahun 2023 yaitu Rp. 762.305.000. Berikut adalah gambar realisasi PNBP BPBL Lombok yang dapat dibandingkan dengan Unit pelaksana Teknis (UPT) Lingkup DJPB lainnya:

No. KODE SATKER 1 2		NAMA SATUAN KERJA 3		TARGET SESUAI PK		ALISASI S/D April 2023	% SESUALPK	S / D BULAN
				4		5	6	7
		REALISASI PENDAPATAN PNBP	Rp					L
1	632462	Direktorat Jenderal Penkanan Budidaya (Pusat)			Rp	308.138.371		April 2023
	1	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp		Rp	45,500,000		CAPAIAN IKU
	п	Pendapatan Non Anggaran	Rp		Rp	262.638.371		
2	445393	Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang	Rp	1.124.725.000	Rp	344.469.987	30,63	April 2023
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	1.124.725.000	Rp	344.469.979	30,63	CAPAIAN IKU
	11	Pedapatan Non Anggaran	Rp	-	Rp	8		
3	239192	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara	Rp	4.240.598.000	Rp	225.260.022	5,31	April 2023
	1	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	4.240.598.000	Rp	203.292.457	4,79	CAPAIAN IKU
	II	Pedapatan Non Anggaran	Rp		Rp	21.967.565		
4	238734	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi	Rp	1.266.132.000	Rp	267.996.975	21,17	April 2023
	1	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	1.266.132.000	Rp	267.764.702	21.15	CAPAIAN IKU
	II	Pedapatan Non Anggaran	Rp	-	Rp	232.273		
5	427706	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung	Rp	1.325.270.000	Rp	367.508.924	27,73	April 2023
	1	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	1.325.270.000	Rp	364.572.224	27,51	CAPAIAN IKU
	п	Pedapatan Non Anggaran	Rp	-	Rp	2.936.700		
6	567350	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo	Rp	3.375.974.000	Rp	1.084.638.178	32,13	April 2023
	1	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	3.375.974.000	Rp	1.077.682.670	31,92	CAPAIAN IKU
	n	Pedapatan Non Anggaran	Rp		Rp	6.955.508		
7	237657	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam	Rp	1.534.500.000	Rp	329.407.286	21,47	April 2023
	1	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	1.534.500.000	Rp	328.406.000	21,40	CAPAIAN IKU
	п	Pedapatan Non Anggaran	Rp		Rp	1.001.286		
8	567680	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar	Rp	1.616.512.000	Rp	544.186.631	33,66	April 2023
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	1.616.512.000	Rp	424.769.240	26,28	CAPAIAN IKU
	п	Pedapatan Non Anggaran	Rp		Rp	119.417.391		
9	567385	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee	Rp	1.632.830.000	Rp	28.988.311	1,78	April 2023
	1	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	1.632.830.000	Rp	26.847.191	1,64	CAPAIAN IKU

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

10	II 567474	Pedapatan Non Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Batam	Rp Rp	1.220.210.000	Rp Rp	2.141.120 189.751.114	15,55	April 2023
10	36/4/4 I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	1.220.210.000	Rp	185.669.139	15,22	CAPAIAN IK
	п	Pedapatan Non Anggaran	Rp	į-	Rp	4.081.975		CAPAIANT
11	567584	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin	Rp	1.150.000.000	Rp	203.086.200	17,66	April 2023
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	1.150.000.000	Rp	193.248.900	16,80	CAPAIAN II
	п	Pedapatan Non Anggaran	Rp		Rp	9.837.300		CHIME
12	538911	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu	Rp	1.143.800.000	Rp	158.567.246	13,86	April 2023
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	1.143.800.000	Rp	110.785.857	9,69	CAPAIAN II
	II	Pedapatan Non Anggaran	Rp	~	Rp	47.781.389		
13	567720	Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Rp	940.200.000	Rp	233.177.448	24,80	April 2023
	I.	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	940.200.000	Rp	219.464.248	23,34	CAPAIAN II
	- 11	Pedapatan Non Anggatan	D ₁₀		Кþ	15./15.200		
14	567762	Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Rp	762.305.000	Rp	196.704.045	25,80	April 2023
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	762.305.000	Rp	171.099.708	22,45	CAPAIAN II
	II	Pedapatan Non Anggaran	Rp		Rp	25.604.337		
15	56/800	Balai Pengujian Kesenatan ikan dan Lingkungan Serang			Кр	438.245.829		April 2023
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	550.000.000	Rp	437.260.999	79,50	CAPAIAN II
	II	Pedapatan Non Anggaran	Rp		Rp	984.830		
+0.00000000000000000000000000000000000		Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem	Rp	706.750.000	Rp	180.415.041	25,53	April 2023
16	445394			706,750,000	Rp	161.829.800	22,90	CAPAIAN II
16	445394 I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp		I CP	101.027.000		
16		Pendapatan Fungsional dan Umum Pedapatan Non Anggaran	Rp	~	Rp	18.585.241		
16	I		Rp Rp	22.589.806.000	1		20,20	CAPAIAN II
16	I	Pedapatan Non Anggaran	Rp	22.589.806.000 - 22.589.806.000	Rp	18.585.241	20,20	CAPAIAN II

Gambar 7. Realisasi PNBP Tahun 2023

Capaian PNBP BPBL Lombok pada Tahun 2023 ini turun sebesar 9,63% dari capaian PNBP Tahun 2022, adapun tampilan secara singkat atas capaian PNBP adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Nilai PNBP BPBL Lombok

Nama SK :Ekonomi sektor perikanan budidaya BPBL Lombok meningkat di wilayah kerja BPBL Lombok											
Nama Indikator : Nilai PNBP Satuan Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok											
Triwulan I T	ahun 2023		Realisasi	Perbandingan Realisasi		Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024				
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I Tahun 2022	Triwulan I Tahun 2023 thd Triwulan I Tahun 2022 (%)	Target 2023	Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target renstra			
100,000,000	171,099,708	171.10%	189,330,716	-9.63	762,305,000	22.45%	830,000,000		20.61		

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini dan Pada Triwulan I Tahun 2023 terdapat kendala yaitu Adanya serangan penyakit ikan yang 33

menyebabkan penjualan ikan konsumi tidak terlalu banyak sehingga tindak lanjut Triwulan berikutnya adalah koordinasi dengan pokja lab kesling untuk menangani serangan penyakit ikan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2:

Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan

 Persentase bantuan sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Kebun Bibit Rumput Laut yang terdistribusikan ke masyarakat berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya nomor 295 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya TA 2023 merupakan bantuan pemerintah berupa barang yaitu sarana dan prasarana KBRL dengan metode:

- 1) Longline;
- 2) Rakit apung; dan
- 3) Lepas dasar.
- 3. Rincian Sarana Bantuan

Pada Tahun 2022 permasalahan yang dihadapi adalah adanya tambahan *Automatic Adjustment* TA.2022 pada kegiatan KBRL sehingga target sebanyak 30 paket berubah menjadi 20 paket dimana tindak lanjut ke depannya adalah menyelesaikan sisa paket KBRL yang tidak dapat terlaksana pada Tahun 2022 di Triwulan II Tahun 2023.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 belum ada capaian IKU untuk Kebun Bibit Rumput Laut karena kegiatan ini masih dalam proses survey dan identifikasi di wilayah NTB dan Bali. Berikut adalah tabel dokumentasi survey dan identifikasi bantuan KBRL:









Gambar 8. Survey dan Identifikasi KBRL ke masyarakat

IKU ini belum dapat dibandingkan dengan UPT lainnya dan capaian sama seperti Triwulan I Tahun 2022 yaitu belum ada realisasi kegiatan. Adapun tampilan secara singkat atas capaian KBRL adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Persentase bantuan sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Nama SK : Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan										
Nama Indikator : Persentase bantuan sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok										
Triwulan I Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan Realisasi		Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024			
Target	Realisasi		Capaian	Triwulan I Tahun 2022	Triwulan I Tahun 2023 thd Triwulan I Tahun 2022 (%)	Target 2023	Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhii renstra	
	0	0	0.00%	С	0	75%	0.00%	24	0.00	

IKU ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 900.000.000 dimana pada Triwulan I Tahun 2023 ini telah terealisasi sebesar Rp 28.462.566 atau 3,16% untuk kegiatan survey dan identifikasi di wilayah Bali dan NTB serta belanja bahan untuk ATK.

Pada Triwulan I Tahun 2023 permasalahan yang dihadapi adalah adanya keterlambatan informasi terkait penentuan calon penerima dan calon lokasi (CPCL) terutama untuk kelompok aspirasi, tindak lanjut ke depannya adalah koordinasi secara intensif dengan Tenaga Ahli untuk mempercepat penentuan kelompok.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3:

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Di Wilayah Kerja BPBL Lombok

3. Persentase Bantuan Benih yang Terdistribusi berdasarkan Usulan Masyarakat Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

BPBL Lombok sebagai salah satu unit pelaksana teknis DJPB mendistribusikan bantuan benih bawal bintang, kakap putih, abalone, ikan hias laut, tiram Mutiara, nila, lele kepada kelompok penerima bantuan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bawal bintang ukuran minimal 2,5 cm
- b. Kakap putih ukuran minimal 2,5 cm
- c. Abalone ukuran minimal 2 cm
- d. Ikan hias laut ukuran minimal 2 cm
- e. Tiram mutiara ukuran minimal 1 cm
- f. Nila ukuran minimal 4 cm
- g. Lele ukuran minimal 4 cm

Pada Tahun 2022 potensi permasalahan yang dapat terjadi ke depannya adalah benih yang disalurkan ke masyarakat dalam kondisi yang kurang baik sehingga pada Tahun 2023 ini BPBL Lombok akan tetap mengoptimalisasi produksi benih ikan laut bermutu untuk memenuhi target bantuan benih.

Target bantuan benih pada Tahun 2023 baru akan diperhitungkan pada Triwulan II, namun pada Triwulan I BPBL Lombok sudah melakukan penyaluran bantuan benih sebanyak 154.500 ekor ke wilayah Lombok Timur dan Lombok Barat. Berikut adalah tabel capaian dan dokumentasi bantuan benih ikan :

Tabel 4. Bantuan benih yang didistribusikan ke masyarakat

No	Jenis Bantuan	Nama Kelompok	Provinsi	Kab/Kota	Tanggal Distribusi	Komoditas	Jumlah Benih (ekor)	Keterangan BAST	SK Penerima			
Jumla	h Total						154,500					
REAL	REALISASI BANTUAN BENIH BPBL LOMBOK TAHUN 2023											
Per bu	Per bulan Januari - 2023											
1	Bantuan Benih Laut	KUB Jangkar Biru	NTB	Lombok Timur	26 Januari 2023	Bawal Bintang	22,000	Nomor B.0283/BPBL- L/PB.140/BB/V2023 tanggal 26 Januari 2023	Nomor B.253/BPBL- L/PB.150/BB/l/2023 tanggal 24 Januari 2023			
REAL	REALISASI BANTUAN BENIH BPBL LOMBOK TAHUN 2023											
Per bu	ulan Februari- 20	23										
1	Bantuan Benih Laut	Bagek Kembar	NTB	Lombok Barat	8 Februari 2023	Kakap Putih	20,000	Nomor B.0418/BPBL- L/PB.140/BB/II/2023 tanggal 8 Februari 2023				
2	Bantuan Benih Laut	Dewi Panggungan	NTB	Lombok Timur	9 Februari 2023	Kakap Putih	20,000	Nomor B.0433/BPBL- L/PB.140/BB/II/2023 tanggal 8 Februari 2023	Nomor B.398/BPBL- L/PB.150/BB/II/2023			
3	Bantuan Benih Laut	Pade Molah	NTB	Lombok Barat	16 Februari 2023	Kakap Putih	25,000	Nomor B.508/BPBL- L/PB.140/BB/II/2023 tanggal 8 Februari 2023	tanggal 06 Februari 2023			
4	Bantuan Benih Laut	Tambak Terune	NTB	Lombok Barat	16 Februari 2023	Kakap Putih	7,500	Nomor B.509/BPBL- L/PB.140/BB/II/2023 tanggal 8 Februari 2023				
REAL	REALISASI BANTUAN BENIH BPBL LOMBOK TAHUN 2023											
Per bu	ulan Maaret- 2023	3										
1	Bantuan Benih Laut	Gili Mangkem	NTB	Lombok Timur	16 Maret 2023	Bawal Bintang	15,000	Nomor B.775/BPBL- L/PB.140/BB/III/2023 tanggal 16 Maret 2023				
2	Bantuan Benih Laut	Keranji Bersatu	NTB	Lombok Timur	16 Maret 2023	Bawal Bintang	15,000	Nomor B.776/BPBL- L/PB.140/BB/III/2023 tanggal 16 Maret 2023	Nomor B.743/BPBL- L/PB.150/BB/III/2023 tanggal 13 Maret 2023			
3	Bantuan Benih Laut	Bertong Bersatu	NTB	Lombok Barat	27 Maret 2023	Bawal Bintang	30,000	Nomor B.835/BPBL- L/PB.140/BB/III/2023 tanggal 27 Maret 2023				









Gambar 9. Dokumentasi penyerahan bantuan Benih Ikan Laut yang disalurkan ke masyarakat

IKU ini belum dapat dibandingkan dengan UPT lainnya dan tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu karena capaian akan dihitung pada Triwulan II atau semester I Tahun 2023. Adapun tampilan secara singkat atas capaian bantuan benih adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Persentase Bantuan Benih yang Terdistribusi berdasarkan Usulan Masyarakat Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Nama SK :Mei	ningkatnya Saran	a dan Prasaran	a Pembudidayaa	n Ikan							
Nama Indikator : Persentase Bantuan Benih yang Terdistribusi berdasarkan Usulan Masyarakat Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut											
Lombok	Lombok										
Tri	wulan I Tahun 20)23	Realisasi	Perbandinga n Realisasi Triwulan I		Realisasi Terhadap	RENSTRA 202	20-2024			
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I Tahun 2022	Tahun 2023 thd Triwulan I Tahun 2022 (%)	Target 2023	Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target renstra	akhir		
-	-	0.00%	0		100	0.00%	100	0.00			

IKU ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 2.458.851.000 dimana pada Triwulan I Tahun 2023 ini telah terealisasi sebesar Rp 911.425.837 atau 37,07% untuk kegiatan pelaksanaan yaitu pemijahan, pendederan I, pendederan II, dan distribusi.

Pada Triwulan I Tahun 2023 terdapat permasalahan yaitu proses distibusi bantuan benih air tawar yang masih terkendala pada revisi anggaran sehingga tindak lanjut ke depannya adalah melakukan revisi RKAKL untuk menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

4. Persentase bantuan calon induk yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

BPBL Lombok sebagai salah satu unit pelaksana teknis DJPB pada Tahun 2023 ini bertanggung jawab mendistribusikan bantuan calon induk ikan bawal bintang, kakap putih, Nila, lele dan tiram mutiara kepada kelompok pembudidaya ikan.

IKU ini merupakan IKU baru dimana pada Tahun 2022 tidak ada kegiatan bantuan calon induk yang didistribusikan ke masyarakat, namun pada Tahun 2023 ini BPBL Lombok mendapat tanggung jawab untuk mendistribusikan bantuan calon induk kepada masyarakat.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, BPBL Lombok masih dalam tahap identifikasi kebutuhan calon induk yg diusulkan tiap kelompok penerima bantuan calon induk ikan laut BPBL Lombok

IKU ini belum dapat dibandingkan dengan UPT lainnya dan tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu karena merupakan IKU baru. Adapun tampilan secara singkat atas capaian bantuan calon induk adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Persentase bantuan calon induk yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup BPBL Lombok

Nama SK :Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan Nama Indikator : Persentase bantuan calon induk yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok										
Triwulan I Tahun 2023 Realisasi				Perbandinga n Realisasi Triwulan I		Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024			
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I Tahun 2022	Tahun 2023 thd Triwulan I Tahun 2022 (%)	Target 2023	Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra		
-	-	0.00%	0	0	100	0.00%	100	0.00		

IKU ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 48.503.000 dimana pada Triwulan I Tahun 2023 ini belum ada realisasi penyerapan anggaran.

Permasalahan yang terjadi pada Triwulan I Tahun 2023 adalah proses distibusi bantuan calon induk air tawar masih terkendala pada revisi anggaran sehingga tindak lanjut ke depannya adalah melakukan revisi RKAKL untuk menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

5. Produksi calon induk unggul di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Produksi calon induk unggul adalah kegiatan produksi calon induk unggul dari BPBL Lombok untuk mendukung ketersediaan kebutuhan induk unggul. Cara penghitungan IKU ini adalah dengan menghitung hasil produksi calon Induk BPBL Lombok yaitu : Tiram Mutiara, Abalone, Ikan Hias, bawal bintang dan kakap putih.

Pada Tahun 2022 potensi permasalahan yang terjadi adalah calon induk unggul yang diproduksi perkembangannya kurang baik sehingga pada Tahun 2023 BPBL Lombok tetap melakukan pemeliharaan calon induk sesuai dengan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik).

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 telah diproduksi calon induk unggul ikan hias sebanyak 65 ekor yang terdiri dari 15 ekor ikan hias clownfish dan 50 ekor ikan hias cardinal banggai.berikut adalah tabel capaian produksi calon induk unggul dan dokumentasi salah satu kegiatan produksi calon induk yaitu komoditas ikan hias :

Tabel 7. capaian produksi calon induk unggul

Produksi													
Calon Induk	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEPT	ОКТ	NOV	DES	TOTAL
Abalone													
Ikan Hias			65										65
Tiram Mutiara													
Kakap putih													
Bawal Bintang													
Jumlah										65			









Gambar 10. Dokumentasi kegiatan produksi calon induk unggul

Capaian Calon induk unggul pada Triwulan I Tahun 2023 turun sebesar 35% dibandingkan capaian calon induk unggul Triwulan I Tahun 2022. adapun tampilan secara singkat atas capaian calon induk unggul ikan laut adalah sebagai berikut :

Tabel 8. calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi

Nama SK :Me	Nama SK :Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan										
Nama Indikat	Nama Indikator : Produksi calon induk unggul ikan laut										
Triwulan I Tahun 2023 Realisasi Perbanding an Realisasi Terhadap RENSTRA 2020-2024											
Target Realisasi Capaian		Capaian	Triwulan I Tahun 2022	Tahun 2023 thd Tahun		Target	Tahunan		Realisasi terhadap		
				2022 (%)		(70)			target renstra	akiiii	
0	0 65 0.00% 100 -35 1400 4.64% 2400 2.71										

Calon Induk Unggul ikan laut yang diproduksi BPBL Lombok prosentase capaiannya lebih rendah dibandingkan dengan BPBL Ambon dan BPBL Batam namun lebih tinggi dari BBPBL Lampung karena BBPBL Lampung belum ada capaian pada Triwulan I, berikut adalah tabel perbandingannya:

Tabel 9. perbandingan prosentase capaian calon induk unggul ikan laut yang diproduksi

UPT	Target	Realisasi	Prosentase
BPBL Lombok	1400	65	4.64
BPBL Ambon	2234	399	17.86
BPBL Batam	1400	733	52.36
BBPBL Lampung	2910	0	0.00

IKU ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 387.726.000 dimana pada Triwulan I Tahun 2023 ini telah terealisasi sebesar Rp 353.903.400 atau 91,28% untuk kegiatan operasional produksi calon induk finfish dan pemeliharaan calon induk kekerangan.

Pada Triwulan I Tahun 2023 terdapat permasalahan yaitu masa pemeliharaan dari benih menjadi induk untuk komoditas laut (finfish dan kekerangan) membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga tindak lanjut pada Triwulan berikutnya adalah optimalisasi pemeliharaan calon induk unggul yang diproduksi

6. Persentase keberhasilan teknologi komoditas unggulan yang dikembangkan lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Indikator kinerja ini mengukur persentase keberhasilan UPT Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dalam menghasilkan paket percontohan teknologi pembenihan pada komoditas unggulan lobster yang diselesaikan sampai 100%, dimana tingkat keberhasilan untuk teknologi pembenihan lobster jika mampu memijahkan dan memelihara larva lobster minimal hingga mencapai fase *phyllosoma*.

IKU ini merupakan IKU Baru dimana pada Tahun 2022 tidak ada IKU Persentase keberhasilan

teknologi komoditas unggulan yang dikembangkan lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, namun pada Tahun 2023 ini BPBL Lombok mendapat tanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut.

Sampai dengan triwulan I Tahun 2023, kegiatan difokuskan pada instalasi telong elong yang merupakan sentra kampung budidaya lobster. Sehingga fokus kegiatan adalah persiapan sarana dan prasarana pendukung produksi.

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan UPT lainnya karena capaian pada akhir tahun dan tidak dapat dibandingkan dengan IKU tahun sebelumnya karena tahun 2022 tidak ada IKU keberhasilan teknologi komoditas unggulan yang dikembangkan lingkup BPBL Lombok. Adapun tampilan secara singkat atas capaian keberhasilan teknologi komoditas unggulan yang dikembangkan lingkup BPBL Lombok:

Tabel 10. Keberhasilan teknologi komoditas unggulan yang dikembangkan lingkup BPBL Lombok

Nama SK :Mer	Nama SK :Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan										
Nama Indikator : keberhasilan teknologi komoditas unggulan yang dikembangkan lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok											
Triwulan	I Tahun 2023		Realisasi	Perbanding		Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024				
Target	Tahun 20		Triwulan I Tahun 2023 Ta Tahun 2022 thd Tahun 2022 (%)		Target Tahunan (%)		Realisasi terhadap target renstra	akhir			
0	0	0.00%	0	0	100	0.00%	100 0.00				

IKU ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000 dimana belum ada realisasi penyerapan anggaran.

Pada Triwulan I Tahun 2023 terdapat permasalahan yaitu meskipun pemijahan lobster sudah bisa dikuasai namun pemeliharaan *phyllosoma* masih terkendala di kematian massal sehingga tindak lanjut ke depannya adalah melakukan optimalisasi pemeliharaan indukan dan juga pengembangan pemeliharaan *phyllosoma* secara terus menerus.

7. Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate di UPT lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Indikator kinerja ini merupakan jumlah planlet/propagul yang diproduksi di Laboratorium Kultur Jaringan Rumput Laut Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dimana planlet/ propagul sendiri merupakan bibit rumput laut muda (hasil pembesaran dari mikropropagul). Satu individu planlet adalah rumput laut muda dengan ukuran 2-3 buah *thallus* yang berukuran 2-3 cm dengan berat sekitar 0,2 – 0,3 gr per individu.

IKU ini merupakan IKU Baru dimana pada Tahun 2022 tidak ada kegiatan produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate, namun pada Tahun 2023 ini BPBL Lombok mendapat tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, produksi bibit rumput laut kultur jaringan masih dalam tahap pemeliharaan mikropropagul. Berikut adalah dokumentasi Pemeliharaan/penumbuhan mikropopagul menjadi thalus muda dengan media PES :



Gambar 10. Pemeliharaan mikropropagul

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan IKU tahun sebelumnya karena tahun 2022 tidak ada IKU produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate di UPT BPBL Lombok. Adapun tampilan secara singkat atas produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate di UPT BPBL Lombok adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate di UPT Lingkup BPBL Lombok

Nama SK :Mer	Nama SK :Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan										
Nama Indikator : Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate di UPT lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok											
Triwulan	I Tahun 2023		Realisasi	Perbanding an Realisasi		Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024				
Target Realisasi Capaian		Triwulan I Tahun 2022		Target 2023	Target Tahunan (%)		Realisasi terhadap target a renstra	akhir			
0	0	0.00%	0	0	3000	0.00%	3000	0.00			

Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate di BPBL Lombok sama seperti BBPBL Lampung yang belum ada capaian dibandingkan BPBL Ambon yang sudah memproduksi sebanyak 2058 planlet, sedangkan BPBL Batam tidak mempunyai target Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate, berikut adalah tabel perbandingannya:

Tabel 12. perbandingan prosentase capaian Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate

UPT	Target	Realisasi	Prosentase
BPBL Lombok	3000	0	0.00
BPBL Ambon	3000	2058	68.60
BPBL Batam	0	0	0.00
BBPBL Lampung	3000	0	0.00

IKU ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 500.000.000 dimana pada Triwulan I Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp 246.830.512 atau 49,37% dari pagu yang digunakan untuk kegiatan belanja barang operasional, belanja peralatan pendukung produksi, mikropropagul, Hi-Blower, dan juga pendingin ruangan

Pada Triwulan I Tahun 2023 terdapat permasalahan yaitu produksi kalus secara mandiri masih belum berhasil dan masih sering terjadinya kematian pada mikropropagul dikarenakan proses transportasi (waktu dan suhu) sehingga tindak lanjut ke depannya adalah melakukan perbanyakan induk alam yang digunakan untuk produksi kalus dan berkoordinasi dengan biotrop untuk menekan kematian pada proses transportasi mikropropagul.

8. Persentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan ke masyarakat

Bioflok yang disalurkan ke masyarakat dengan kriteria yang tercantum dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya nomor 328 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah sarana dan prasarana budidaya ikan lele dan/atau ikan nila sistem bioflok Tahun Anggaran sebagai berikut :

- a.benih ikan;
- b.pakan ikan starter;
- c. Pakan ikan Grower dan finisher;
- d. obat ikan dan vitamin;
- e. prasarana dan sarana operasional;
- f. peralatan perikanan;
- g. pendampingan teknis bioflok.

Pada Tahun 2022 potensi permasalahan yang terjadi adalah jarak pengadaan benih dan bahan bioflok yang terlalu lama sehingga pada direncanakan pada Tahun 2023 ini BPBL akan mengatur jadwal pengadaan benih dan bahan bioflok agar jarak antara terselesaikannya sarana dan waktu tebar benih tidak terlalu lama.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, BPBL Lombok masih dalam tahap pelaksanakan proses identifikasi dan verifikasi di wilayah Bali, NTB, dan NTT. Berikut adalah dokumentasi kegiatan identifikasi dan verifikasi:









Gambar 11. Kegiatan Identifikasi dan verifikasi

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan UPT lainnya dan tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu karena pada Triwulan I Tahun 2023 ini belum ada capaian. Adapun tampilan bantuan bioflok secara singkat adalah sebagai berikut :

Tabel 13. Persentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan ke masyarakat

Nama SK :M	Nama SK :Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan											
Nama Indikator : Persentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan ke masyarakat												
Triwula	an I Tahun 202	23	Realisasi	Perbandinga n Realisasi		Realisasi Terhadap	RENSTRA 202	20-2024				
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I Tahun 2022	Tahun 2023 thd Tahun 2022 (%)	Target 2023	Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra				
0	0	0.00%	0		100	0.00%	100	0.00				

IKU ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp 6.075.000.000 dimana pada Triwulan

I Tahun 2023 ini telah

terealisasi sebesar Rp. 47.197.856 atau 0,78% dari pagu yang digunakan untuk belanja bahan ATK kegiatan dan juga survey serta identifikasi di wilayah Bali, NTB juga NTT.

Pada Tahun Triwulan I Tahun 2023 terdapat permasalahan yaitu keterlambatan informasi terkait penentuan calon penerima dan calon lokasi (CPCL) terutama untuk kelompok aspirasi dan juga revisi juknis bioflok yang hingga Triwulan I ini masih dalam proses pembahasan di eselon I,sehingga tindak lanjut pada Triwulan II adalah koordinasi secara intensif dengan Tenaga Ahli untuk mempercepat penentuan kelompok dan juga melakukan koordinasi dengan eselon I untuk memonitoring perkembangan juknis bioflok.

9. Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat

Diseminasi adalah suatu kegiatan yang interaktif dalam menyampaikan informasi yang mana ditujukan kepada kelompok masyarakat ataupun individu.

IKU ini merupakan IKU Baru dimana pada Tahun 2022 tidak ada kegiatan diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat, namun pada Tahun 2023 ini BPBL Lombok mendapat tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan diseminasi teknologi pembesaran ikan sebanyak 1 (satu) kali di Propinsi NTT, berikut adalah dokumentasi kegiatan diseminasi teknologi tersebut :









Gambar 12. Kegiatan diseminasi teknologi

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan UPT lainnya karena capaian pada akhir tahun dan tidak dapat dibandingkan dengan IKU tahun sebelumnya karena tahun 2022 tidak ada IKU persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat. Adapun tampilan secara singkat atas capaian IKU persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat

Nama SK :M	Nama SK :Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan										
Nama Indikator : Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat											
Triwula	an I Tahun 202	23	Realisasi	Perbandinga n Realisasi		Realisasi Terhadap	RENSTRA 202	20-2024			
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I Tahun 2022	Tahun 2023 thd Tahun 2022 (%)	Target 2023	Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra			
0	0	0.00%	0	0	100	0.00%	100	0.00			

IKU ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp 300.000.0000 dimana pada Triwulan I Tahun 2023 ini telah terealisasi sebesar Rp. 98.888.692 atau 32,96% dari pagu yang digunakan untuk kegiatan diseminasi teknologi.

Pada Tahun Triwulan I Tahun 2023 baru bisa dilaksanakan kegiatan diseminasi teknologi sebanyak 1 (satu) kali, sehingga tindak lanjut ke depannya adalah melakukan koordinasi secara lebih intensif kepada tenaga ahli (TA) dan juga 2 anggota dewan DAPIL Propinsi NTB untuk pelaksanaan kegiatan diseminasi teknologi pembesaran ikan ke masyarakat selanjutnya.

10. Persentase Model Usaha Budidaya Komoditas Unggulan yang Dikembangkan oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Pembangunan perikanan budidaya berbasis komoditas unggulan menjadi salah satu program yang akan dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dimana Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok melaksanakan pemeliharaan lobster dari benih sampai mencapai ukuran konsumsi.

IKU ini merupakan IKU Baru dimana pada Triwulan I Tahun 2023 BPBL Lombok sudah merelokasi 2 unit KJA Aquatec (8 petak) beseta jaring budidaya sebagai wadah pengembangan model usaha lobster.

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan UPT lainnya karena capaian pada akhir tahun dan tidak dapat dibandingkan dengan IKU tahun sebelumnya karena tahun 2022 tidak ada IKU

Persentase Model Usaha Budidaya Komoditas Unggulan yang Dikembangkan oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok. Adapun tampilan secara singkat atas capaian Persentase Model Usaha Budidaya Komoditas Unggulan yang Dikembangkan oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Keberhasilan teknologi komoditas unggulan yang dikembangkan lingkup BPBL Lombok

Nama SK : Mei	Nama SK : Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan											
Nama Indikator : Persentase Model Usaha Budidaya Komoditas Unggulan yang Dikembangkan oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok												
Triwulan I Tahun 2023 Realisasi Realisasi Realisasi Relisasi RenST								20-2024				
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I Tahun 2022	Triwulan I Tahun 2023 thd Triwulan I Tahun 2022 (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target ak renstra	khir					
0	0	0.00%	0	0	100%	0.00%	100	0.00				

IKU ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 350.000.000 dimana pada Triwulan I Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp 145.892.850 atau 96,79 % dari pagu yang digunakan untuk pengadaan ponton dan rumah jaga.

Pada Triwulan I Tahun 2023 terdapat permasalahan yaitu belum berjalannya kegiatan budidaya lobster sehingga tindak lanjut ke depannya adalah melakukan percepatan pembuatan rumah jaga (ponton) di KJA dan rehab rumah genset beserta gudang pakan segar (ruang freezer) agar kegiatan budidaya lobster dapat segera berjalan.

11. Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias yang disalurkan ke masyarakat

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Hias TA 2023, BPBL Lombok sebagai salah satu unit pelaksana teknis DJPB mendistribusikan bantuan Sarana dan Prasarana ikan hias kepada kelompok pembudidaya ikan, dimana bantuan yang diberikan berupa paket ikan koi 3, yang terdiri dari :

- a. Wadah pemeliharaan;
- b. Peralatan;
- c. Instalasi air dalam kondisi terpasang;
- d. Instalasi listrik dalam kondisi terpasang;
- e. Perlengkapan kerja;

f. Induk dan pakan.

IKU ini merupakan IKU Baru dimana pada Tahun 2022 tidak ada kegiatan sarana dan prasarana budidaya ikan hias yang disalurkan ke masyarakat, namun pada Tahun 2023 ini BPBL Lombok mendapat tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, BPBL Lombok masih dalam proses pengecekan proposal yang masuk untuk dilakukan identifikasi dan verifikasi.

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan UPT lainnya karena capaian pada akhir tahun dan tidak dapat dibandingkan dengan IKU tahun sebelumnya karena tahun 2022 tidak ada IKU Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias yang disalurkan ke masyarakat. Adapun tampilan secara singkat atas capaian Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias yang disalurkan ke masyarakat:

Tabel 16. Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias yang disalurkan ke masyarakat

Nama SK :Mo	Nama SK :Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan										
Nama Indikator : Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias yang disalurkan ke masyarakat											
Triwulan I Tahun 2023 Realisasi Perbandinga Realisasi RENSTRA 2020-2024											
Invaic			realisasi	n Realisasi Tahun 2023	Target 2023	Terhadap	TENSTINA 202	LO 2024			
						Target		Realisasi			
Target	Poalicaci	Poalicaci	Realisasi	Capaian	Triwulan I	thd Tahun	Target 2023	Tahunan	Target 2024	terhadap	
laiget	Realisasi	Сараган	Tahun 2022	2022 (%)		(%)	Target 2024	target akhir			
				2022 (78)		(70)		renstra			
0	0	0.00%	0	0	100	0.00%	100	0.00			

IKU ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 270.000.000 dimana pada Triwulan I Tahun 2023 belum ada realisasi penyerapan anggaran karena masih dalam tahap pengecekan proposal.

Pada Triwulan I Tahun 2023 ini terdapat permasalahan yaitu belum bisa dilaksanakannya kegiatan identifikasi dan verifikasi karena masih dalam proses pengecekan proposal yang masuk ke BPBL Lombok. Sehingga tindak lanjut ke depannya adalah berkoordinasi dengan penyuluh dan dinas KP lombok timur untuk segera dilaksanakan kegiatan identifikasi dan verifikasi bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan hias.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3:

Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan

12. Persentase sampel Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)

Jumlah sampel yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium keskanling adalah pelayanan sampel oleh laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan BPBL Lombok yang terdiri dari pengujian kualitas air, patologi, mikrobiologi (non AMR), dan biologi molekuler.

Pada Tahun 2022 terdapat permasalahan berupa kurangnya kontrol dalam perhitungan capaian sampel uji untuk tiap parameter sehingga tindak lanjut pada Tahun 2023 ini adalah memonitoring capaian uji sampel tiap bulannya.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, BPBL telah menguji sebanyak 369 sampel atau 26,53 % dari target sampel sebanyak 1.391 sampel. Berikut ini adalah rincian jumlah sampel dan dokumentasi kegiatan pengambilan sampel :

Tabel 17. Realisasi Jumlah sampel yang diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan

				Ruang Lingkup U	Jji			
No.	Bulan	Kualitas	Molekuler	Mikrobiologi	Parasit dan	Residu	Jumlah	Kumulatif
		Air	iviolekuler	Mikrobiologi	Patologi	Residu		
1	Januari	73	17	16	15	0	121	121
2	Februari	71	15	6	8	0	100	221
3	Maret	104	8	33	3	0	148	369
4	April						0	
5	Mei						0	
6	Juni						0	
7	Juli						0	
8	Agustus						0	
9	September						0	
10	Oktober						0	
11	November						0	
12	Desember						0	
	TOTAL	248	40	55	26	0	369	









Gambar 13. Kegiatan pengambilan sampel

Prosentase sampel kesehatan ikan dan lingkungan pada Triwulan I Tahun 2023 turun sebesar 83.19% dari capaian sampel Triwulan I Tahun 2022, adapun tampilan secara singkat atas capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 18. persentase sampel kesehatan ikan dan lingkungan yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium

Nama SK :Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan									
Nama Indikator : Persentase sampel Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai									
Perikanan Budidaya Laut Lombok									
Triwulan I Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan		Realisasi	RENSTRA 2020-2024		
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I Tahun 2022	Realisasi Tahun	Target 2023	Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhi renstra	
25	26.53	106.12%	157.83	-83.19	100	0.27	2,600	1.02	

Jumlah prosentase capaian sampel yang diuji di BPBL Lombok capaiannya lebih rendah dibandingkan BBPBL Lampung, BPBL Batam, dan BPBL Ambon. Berikut adalah tabel perbandingannya:

Tabel 19. Perbandingan prosentase capaian jumlah sampel lab kesling UPT Laut

UPT	Target (%)	Realisasi (%)		
BPBL Lombok	100	26.53		
BPBL Ambon	100	62.69		
BPBL Batam	100	64.5		
BBPBL Lampung	100	38.21		

IKU ini didukung pagu anggaran sebesar Rp 402.660.000 dimana pada Triwulan I Tahun 2023 ini belum ada realisasi penyerapan anggaran.

Pada Triwulan I Tahun 2023 ini terdapat permasalahan yaitu belum optimalnya kegiatan perjalanan pengambilan sampel oleh tim lab kesling sehingga tindak lanjut pada Triwulan berikutnya adalah berkoordinasi dengan TIM Laboratorium Keskanling untuk segera membuat jadwal perjalanan pengambilan sampel untuk semua parameter uji yang menjadi target pengujian untuk tahun 2023.

13. Persentase sampel antimikrobial resistance (AMR) yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Resistansi antimikroba adalah suatu keadaan dimana mikroorganisme mampu untuk bertahan pada dosis terapi senyawa antimikroba, sehingga mikroorganisme tersebut masih mampu berkembang, mengurangi keampuhan obat, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, memperparah, dan menyebabkan kematian dalam tindakan pengobatan pada manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan. Pengendalian Resistansi Antimikroba (*Antimicrobial Resistance*/AMR) merupakan aktivitas yang ditujukan untuk mencegah dan/atau menurunkan adanya kejadian mikroba resistan.

Sesuai dengan INPRES No 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistansi Antimikroba (RAN PRA) Tahun 2020-2024, dimana KKP dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya berkontribusi dalam pengendalian resistansi antimikroba pada sektor kesehatan ikan, salah satu strategi pada RAN PRA tahun 2020-2024 adalah peningkatan pengetahuan dan bukti ilmiah melalui surveilans dan penelitian.

Pengujian resistansi antimikroba oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok untuk mengetahui tingkat resistansi mikroba akibat penggunaan antimikroba, dimana semakin kecil tingkat resistansi mikrobanya, semakin bagus pengendalian resistansi antimikrobanya.

Pada Tahun 2022 ini potensi permasalahan yang dapat terjadi adalah lalainya petugas laboratorium kesling dalam memonitoring target dan capaian per bulan pada tiap parameter sehingga pada Tahun 2023 ini BPBL Lombok akan selalu memonitoring capaian uji sampel tiap bulannya sesuai dengan parameter.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, BPBL Lombok telah menguji sampel AMR sebanyak 13 sampel atau 25,49% dari 51 target sampel AMR.berikut adalah rincian jumlah sampel AMR dan dokumentasi uji sampel AMR :

Tabel 20. Realisasi Jumlah sampel AMR

No.	Bulan				
NO.	Dulaii	AMR			
1	Januari	4			
2	Februari	3			
3	Maret	6			
4	April				
5	Mei				
6	Juni				
7	Juli				
8	Agustus				
9	September				
10	Oktober				
11	November				
12	Desember				
	TOTAL				



Gambar 13. Inokulasi bakteri dari sampel ke media MHA

IKU Persentase sampel antimikrobial resistance (AMR) yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok turun sebesar 82.16 % jika dibandingkan dengan IKU capaian sampel tersebut pada Tahun 2022. adapun tampilan secara singkat atas capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 21. Persentase sampel antimikrobial resistance (AMR) yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Nama SK :M	Nama SK :Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan								
Nama Indika Budidaya La	ator : Persentase sampe ut Lombok	l antimikrobia	al resistance (AN	1R) yang diuji Laborat	torium Keseha	tan Ikan dan	Lingkungan Ba	lai Perikanan	
Triwulan I Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan		Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024		
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I Tahun 2022	Realisasi TW I 2023 dibandingkan TW I 2022	Target 2023	Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra	
25	25.49	101.96%	143	-82.16	100	25.49%	100	25.49	

Jumlah prosentase capaian sampel AMR BPBL Lombok capaiannya lebih rendah dibandingkan BBPBL Lampung, BPBL Batam dan BPBL Ambon. Berikut adalah tabel perbandingannya:

Tabel 22. Perbandingan prosentase capaian jumlah sampel AMR UPT Laut

UPT	Target (%)	Realisasi (%)
BPBL Lombok	100	25.49
BPBL Ambon	100	98.04
BPBL Batam	100	44
BBPBL Lampung	100	30.23

IKU ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 44.393.000 dimana pada Triwulan I Tahun 2023 belum ada realisasi penyerapan anggaran.

Pada Triwulan I Tahun 2023 terdapat permasalahan yaitu belum optimalnya kegiatan perjalanan pengambilan sampel oleh tim lab kesling sehingga tindak lanjut ke depannya adalah berkoordinasi dengan Tim Laboratorium Keskanling untuk segera membuat jadwal perjalanan pengambilan sampel untuk parameter uji AMR yang menjadi target pengujian untuk tahun 2023

14. Indeks profesionalitas ASN lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)

Indikator kinerja IKU ini adalah adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas ASN diukur menggunakan standar profesionalitas ASN. Standar professional ASN terdiri dari empat dimensi, yaitu:

- 1. Kualifikasi, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS,
- 2. Kompetensi, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/Sejenis;
- 3. Kinerja, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata-rata kinerja individu pada suatu unit kerja;

4. Disiplin, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.

Pada Tahun 2022 potensi permasalahan yang dapat terjadi adalah masih adanya beberapa pegawai yang kurang aktif mengikuti bimtek/diklat/seminar/in house training sehingga pada Tahun 2023 BPBL Lombok akan memfasilitasi pelaksanaan bimtek/diklat/seminar/in house training secara internal maupun eksternal untuk ASN BPBL Lombok .

Target IP ASN baru akan diperhitungkan pada Triwulan II, namun BPBL Lombok pada Triwulan I Tahun 2023 telah melaksanakan bimtek penyusunan SKP Tahun 2023 dimana seluruh pegawai hadir untuk dapat memahami penyusunan SKP dengan aplikasi baru e-kinerja BKN.

IKU ini belum dapat dibandingkan dengan UPT lainnya dan tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu karena capaian akan dihitung pada Triwulan II atau semester I Tahun 2023. Adapun tampilan secara singkat atas capaian IP ASN BPBL Lombok adalah sebagai berikut :

Tabel 23. Indeks profesionalitas ASN lingkup satker BPBL Lombok

Nama SK :Ta	Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok									
Nama Indikator : Indeks profesionalitas ASN lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)										
Triwula	ı I Tahun 2023		Realisasi	Perbandingan		Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024			
Target	Realisasi	Capaian Triwulan I dibandingkan TW Tahun 2022 2022		Target 2023	Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra			
0	0	0.00%	0	0	81	0.00%	81	0.00		

Tidak ada alokasi anggaran khusus untuk indikator kinerja ini dan Permasalahan yang terjadi pada Triwulan I Tahun 2023 ini adalah masih ditemukan banyak pegawai yang telah mengikuti Bimtek maupun pelatihan lainnya belum mengupdate data Kursus di e-pegawai sehingga IP ASN BPBL Lombok masih dalam kategori RENDAH sehingga tindak lanjut ke depannya adalah melakukan monitoring pegawai yang telah mengikuti diklat/bimtek/webinar untuk dapat mengupdate data kursus pada e-pegawai masing-masing ASN.

15. IKU Hasil penilaian pembangunan ZI menuju WBK di Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Unit Kerja yang berpredikat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan pelayanan publik.

Pada Tahun 2022 BPBL Lombok telah memperoleh nilai sebesar 82,20 sehingga BPBL Lombok memperoleh predikat unit kerja menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan KKP. Meskipun demikian, Pada tahun 2023 BPBL tetap harus mempertahankan predikat tersebut dengan tetap melakukan monitoring pengumpulan dokumen sesuai LKE Itjen.

IKU ini belum dapat dibandingkan dengan UPT lainnya dan tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu karena capaian akan dihitung pada akhir tahun. Adapun tampilan secara singkat atas capaian Hasil penilaian pembangunan ZI menuju WBK di Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok adalah sebagai berikut :

Tabel 24. Hasil penilaian pembangunan ZI menuju WBK di Satker BPBL Lombok

Nama SK :Ta	Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok									
Nama Indikator : Hasil penilaian pembangunan ZI menuju WBK di Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok										
Triwular	n I Tahun 2023		Realisasi	Perbandingan		Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020	-2024		
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I Tahun 2022	Realisasi TW I 2023 dibandingkan TW I 2022	Target 2023	Target Tahunan (%)	Target 2024 Realisasi terhadap target akhir renstra			
0	0	0.00%	0	0	81	0.00%	81	0.00		

Tidak ada alokasi anggaran khusus untuk indikator ini dan permasalahan yang terjadi pada Triwulan I Tahun 2023 ini adalah proses pengumpulan dokumen dan data dukung membutuhkan waktu yang cukup lama dan perlunya konsistensi dari Ketua tim dan anggota untuk tetap melakukan pengumpulan dokumen yang bersifat rutin, sehingga tindak lanjut ke depannya adalah melakukan interaksi yang lebih intens melalui rapat-rapat internal yang diagendakan dilakukan secara bulanan sebagai wadah komunikasi untuk mewujudkan Zona Intergritas

16. IKU Prosentase Penyelesaian LHP BPK Satker BPBL Lombok

Prosentase penyelesaian LHP BPK BPBL Lombok merupakan penghitungan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan/ LHP BPK yang dilaksanakan di BPBL Lombok sebagai bentuk

komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas yang dapat berpengaruh pada persepsi laporan keuangan BPBL Lombok.

Pada tahun 2022, potensi permasalahan yang dapat terjadi adalah adanya temuan-temuan karena kurang lengkapnya dokumen-dokumen yang diperlukan saat pemeriksaan BPK sehingga pada Tahun 2023 BPBL Lombok akan selalu melakukan perbaikan-perbaikan dokumen keuangan sesuai dengan rekomendasi dari BPK.

IKU ini belum dapat dibandingkan dengan UPT lainnya dan tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu karena capaian akan dihitung pada akhir tahun. Adapun tampilan secara singkat atas capaian prosentase penyelesaian LHP BPK Satker BPBL Lombok adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Prosentase Penyelesaian LHP BPK BPBL Lombok

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok									
Nama Indikator : Prosentase Penyelesaian LHP BPK Satker BPBL Lombok									
Triwulan I Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan		Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024		
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I Tahun 2022	Realisasi TW I 2023 dibandingkan TW I 2022	Target 2023	Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra	
0	0	0.00%	0	0	100	0.00%	100	0.00	

Tidak ada alokasi anggaran khusus untuk indikator kinerja ini dan pada Triwulan I Tahun 2023 belum ada LKHP BPK yang harus diselesaikan, meskipun demikian tindak lanjut ke depannya adalah melaksanakan penyusunan dan pendokumentasian dokumen keuanghan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

17. IKU Nilai Rekon SAKIP Lingkup Satker BPBL Lombok

Akuntabilias kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penilaian atas Kinerja Lingkup BPBL Lombok yang dilakukan melalui Rekonsiliasi antara Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya / DJPB dengan Biro perencanaan dengan tujuan agar pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntabilitas dan peraturan yang ada. Dengan

adanya rekon kinerja diharapkan terjadi sinergi yang baik antara satker UPT dan DJPB dalam mempercepat capaian kinerja yang sudah ditetapkan.

Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.

Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 5 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (10%), dan capaian kinerja (20%).

Pada tahun 2022, potensi permasalahan yang dapat terjadi adalah kurang lengkap dan cermat dokumen laporan kinerja yang disusun sehingga pada Tahun 2013 BPBL Lombok akan tetap melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan rambu-rambu kinerja yang berlaku.

IKU ini belum dapat dibandingkan dengan UPT lainnya dan tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu karena capaian akan dihitung pada akhir tahun. Adapun tampilan secara singkat atas capaian nilai rekon SAKIP lingkup BPBL Lombok adalah sebagai berikut :

Tabel 26. Nilai Rekon SAKIP lingkup Satker BPBL Lombok

Nama SK :Ta	Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Nama Indikator : Nilai Rekon SAKIP Lingkup Satker BPBL Lombok									
Triwulan I Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan		Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024		
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I Tahun 2022	Realisasi TW I 2023 dibandingkan TW I 2022	Target 2023	Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra	
0	0	0.00%	0	0	100	0.00%	90	0.00	

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada IKU ini, permasalahan pada Triwulan I Tahun 2023 adalah adanya perubahan mekanisme kerja sesuai dengan Permen KP 43 Tahun 2023, dimana BPBL Lombok memerlukan waktu dalam pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi untuk menentukan tim kerja berdasarkan komposisi validitas atau nilai tingkat kendali indikator kinerja sehingga tindak lanjut ke depannya adalah menyusun dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja dengan ketentuan yang terbaru.

18. IKU Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)

Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPBL Lombok adalah prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan di BPBL Lombok yang telah ditindaklanjuti dengan status tuntas. Cara perhitungan ini adalah dokumen yang tindak lanjutnya telah tuntas diselesaikan dibandingkan dengan jumlah temuan hasil pengawasan.

Pada Tahun 2022, potensi permasalahan yang dapat terjadi adalah kurang tanggapnya Balai dalam menindaklanjuti temuan itjen sehingga pada tahun 2023 ini BPBL Lombok akan selalu berkoordinasi dengan Itjen dan Operator SIDAK DJPB dalam pemantauan di aplikasi SIDAK.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, berdasarkan surat dari sesditjen perikanan budidaya nomor B.2647/DJPB.1/TU.210/IV/2023 tanggal 4 April 2023 perihal Capaian IKU prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan adalah sebesar 100% atau tidak ada temuan yang tidak ditindaklanjuti.

Capaian IKU ini sama dengan capaian IKU pada Triwulan I Tahun 2022 yaitu sebesar 100%, Adapun tampilan secara singkat atas capaian Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok adalah sebagai berikut :

Tabel 27. Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup satker BPBL Lombok

Nama SK :Tat	Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok									
Nama Indikator: Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Balai Perikanan										
Budidaya Lau	ıt Lombok									
Triwulan I Tahun 2023 Realisa			Realisasi	Perbandingan		Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020	-2024		
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I Tahun 2022	Realisasi TW I 2023 dibandingkan TW I 2022	Target 2023	Target Tahunan (%)	Target 2024 Realisasi terhadap target akhir renstra			
75	100	133.33%	100	0	100	100.00%	90	111.11		

Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sama dengan UPT Laut lainnya, yaitu 100%, berikut adalah tabel perbandingannya:

Tabel 28. Perbandingan prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan

UPT	Target (%)	Realisasi (%)	Prosentase	
BPBL	75	100	133.33	
Lombok	,	100	133.33	
BPBL	75	100	133.33	
Ambon	73	100	133.33	
BPBL Batam	75	100	133.33	
BBPBL	75	100	133.33	
Lampung	75	100	133.33	

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini dan Pada Triwulan I Tahun 2023 potensi permasalahan yang dapat terjadi adalah kurang lengkapnya pendokumentasian pencairan anggaran sehingga tindak lanjut triwulan II Tahun 2023 adalah melakukan perbaikan secara terus menerus terkait pendokumentasian pencairan anggaran untuk meminimalisir kesalahan dalam proses pencairan suatu pekerjaan.

19. IKU Prosentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar;

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 2 komponen, yaitu Komponen Dokumen, dan Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi *Bitrix24*, dengan pembobotan sebagai berikut :

- 1. Dokumen (Bobot 20%) : Renstra 2020-2024; Perjanjian Kinerja; Manual IKU; Rencana Kerja; Rencana Aksi Kinerja atas Perjanjian kerja; Laporan Kinerja.
- 2. Keaktifan (bobot 80%): Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.

Pada Tahun 2022, potensi permasalahan yang dapat terjadi adalah minimnya keaktifan dalam mengisi *bitrix24*, sehingga pada Tahun 2023 ini BPBL Lombok akan terus meningkatkan keaktifan mengisi bitrix dengan memperhatikan kriteria yang harus dipenuhi dalam penilaian dan memperhatikan jumlah postingan yang diupload per triwulan pada aplikasi bitrix24 agar target dapat tercapai.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, berdasarkan surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya nomor B.2775/DJPB.1/TU.210/IV/2023 tanggal 6 April 2023 perihal Capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar DJPB Triwulan I Tahun 2023, BPBL Lombok meraih nilai 100 dari target 92.

Capaian IKU ini sama dengan capaian IKU pada Triwulan I Tahun 2022 yaitu sebesar 100%, Adapun tampilan secara singkat atas capaian Prosentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar adalah sebagai berikut :

Tabel 29. Prosentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok										
Nama Indikator : Prosentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar										
Triwulan I Tahun 2023 Realisas			Realisasi	Perbandingan		Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024			
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I Tahun 2022	Realisasi TW I 2023 dibandingkan TW I 2022	Target 2023	Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra		
92	100	108.70%	100	0	92	108.70%	84	119.05		

Prosentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sama dengan UPT Laut lainnya, yaitu 100%, berikut adalah tabel perbandingannya:

Tabel 30. Capaian Manajemen Pengetahuan Lingkup UPT DJPB

No	Unit Kerja	Nilai		
1	BBPBL Lampung	100		
2	BBPBAT Sukabumi	100		
3	BBPBAP Jepara	100		
4	BPBL Ambon	100		
5	BPBAP Ujung Batee	100		
6	BPBAP Takalar	100		
7	BPBAT Sungai gelam	100		
8	BPBAT Tatelu	100		
9	BPBAP Situbondo	100		
10	BPBAT Mandiangin	100		
11	BPBL Lombok	100		
12	BPBL Batam	100		
13	BLUPPB Karawang	100		
14	BPIUUK Karangasem	100		
15	BPKIL Serang	100		

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini dan pada Triwulan I Tahun 2023 ini terdapat permasalahan yaitu masih sering terjadi keterlambatan penguploadan kegiatan pada aplikasi bitrix sehingga tindak lanjut pada Triwulan II Tahun 2023 adalah perlu ada adanya *self awarness* dalam penginputan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan agar dapat ter-upload tepat waktu.

20. IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker BPBL Lombok (%);

Nilai IKPA adalah Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan *spending review* terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiscal dan ekonomi dengan berdasarkan 8 (delapan) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Devisiasi RDP, Penyerapan anggaran, belanja kontraktual, Penyelesaian Tagihan, pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output.

Pada Tahun 2022, potensi permasalahan yang dapat terjadi adalah kurang telitinya pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI sehingga pada tahun 2023 ini BPBL akan selalu melaksanakan belanja anggaran negara dan pengisian capaian output secara tepat waktu dengan tetap memperhatikan koridor peraturan yang berlaku.

IKU ini belum dapat dibandingkan dengan UPT lainnya dan tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu karena capaian akan dihitung pada Triwulan II Tahun 2023 atau Semester I Tahun 2023. Adapun tampilan secara singkat atas capaian nilai IKPA satker BPBL Lombok adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Nilai IKPA Satker BPBL Lombok

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok										
Nama Indikator : nilai IKPA satker BPBL Lombok										
Triwulan I Tahun 2023 Realisasi			Realisasi	Perbandingan		Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024			
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I Tahun 2022	Realisasi TW I 2023	Target 2023	Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra		
0	0	0.00%	0	0	89	0.00%	89	0.00		

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini dan Pada Triwulan I Tahun 2023 ini permasalahan yang terjadi adalah masih terjadi kesalahan kode akun dalam penginputan di aplikasi SAKTI dan ditemukan adanya ketidakcermatan dalam membuat dokumen Rencana Penarikan Dana, sehingga tindak lanjut pada Triwulan II Tahun 2023 adalah ______

melakukan koordinasi internal antara pengelola keuangan untuk mengurangi terjadinya ketidaksesuaian akun dalam penginputan pada aplikasi SAKTI dan koordinasi antara penyusun anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen sehingga Rencana Penarikan Dana tidak jauh meleset dari apa yang telah dibuat.

21. IKU Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker BPBL Lombok (%)

Nilai Kinerja Anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya yang perhitungannya diperoleh melalui aplikasi SMART DJA.

Pada aplikasi SMART DJA, pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.

Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga.

Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah

Pada Tahun 2022, potensi permasalahan yang dapat terjadi adalah tidak diisinya capaian output pada aplikasi SMART DJA sehingga pada Tahun 2023 BPBL Lombok melakukan pengisian dan monitoring hasil capaian output dan progressnya di aplikasi SMART DJA.

IKU ini belum dapat dibandingkan dengan UPT lainnya dan tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu karena capaian akan dihitung pada akhir tahun. Adapun tampilan secara singkat atas capaian NKA satker BPBL Lombok adalah sebagai berikut :

Tabel 32. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker BPBL Lombok

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok										
Nama Indikator : Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker BPBL Lombok										
Triwulan I Tahun 2023 Realisasi			Realisasi	Perbandingan		Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024			
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I Tahun 2022	Realisasi TW I 2023	Target 2023	Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra		
0	0	0.00%	0	0	82	0.00%	85	0.00		

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini dan Pada Triwulan I Tahun 2023 terdapat permasalahan yaitu adanya perubahan pola pengisian pada aplikasi SMART DJA yang mengacu pada aplikasi SAKTI sehingga tindak lanjut triwulan II Tahun 2023 adalah menyesuaikan penginputan SMART DJA dengan pola yang terbaru.

22. IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa (%);

IKU tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup BPBL Lombok yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan PBJ BPBL Lombok diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1. Manajemen Risiko PBJ Strategis (5%)
- 2. Aktivitas Pengendalian telah dilaksanakan sesuai Manajemen Risiko yang disusun (5%)
- 3. Paket pengadaan melalui penyedia yang telah diumumkan dalam SIRUP (5%)
- 4. Ketersediaan KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian (5%)
- 5. HPS pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan (5%)
- 6. Pemilihan penyedia barang/Jasa untuk pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian yang dilaksanakan melalui SPSE (10%)
- 7) Jumlah pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian yang telah dikontrakkan (Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa) (11,25%)
- 8) Kesesuaian waktu penyelesaian pengadaan barang/jasa dengan kontrak berbentuk surat perjanjian (11,25%)

- 9) Kesesuaian kuantitas (jumlah/volume) pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian (11,25%)
- 10) Kesesuaian spesifikasi pengadaan BARANG dengan kontrak berbentuk surat perjanjian (11,25%)
- 11) Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan PBJ (5%)
- 12) Hasil pengawasan Inspektorat Mitra terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa ditindaklanjuti oleh Unit yang bersangkutan (15%)
- 13) Persentase besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa (TKDN)

Pada Tahun 2022, tidak ada kendala yang berarti, namun BPBL Lombok akan tetap menyusun RUP untuk tahun 2023 dan menyelesaikan paket-paket pengadaan yang ada di RUP agar bisa terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

IKU ini belum dapat dibandingkan dengan UPT lainnya dan tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu karena capaian akan dihitung pada akhir tahun. Adapun tampilan secara singkat atas capaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

Tabel 33. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok										
Nama Indikator : Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa										
Triwulan I Tahun 2023 Realisasi			Realisasi	Perbandingan		Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024			
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I Tahun 2022	Realisasi TW I 2023	dibandingkan TW I	Target 2023	Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra	
0	0	0.00%	0	0	77.5	0.00%	72.5	0.00		

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada Indikator kinerja ini dan Pada Triwulan I Tahun 2023 permasalahan yang terjadi adalah proses pengadaan beberapa barang seperti pakan benih ikan dan juga bahan kimia mengalami keterlambatan karena terkendala di pengurusan P3DN karena merupakan barang impor sehingga tindak lanjut Triwulan II Tahun 2023 adalah mencari informasi ke UPT DJPB lainnya yang telah mendapatkan izin penggunaan item-item barang impor, yang sesuai aturan bisa digunakan oleh BPBL Lombok jika memiliki jenis dan spesifikasi yang sama.

23. IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkup Satker BPBL Lombok (%);

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup BPBL Lombok yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1. Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (25%).
- 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN (15%).
- 3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat (15%).
- 4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2021 (20%)
- 5. Penyusunan Laporan BMN secara tepat waktu (25%).

Pada Tahun 2022 tidak ada kendala yang berarti, meskipun demikian pada Tahun 2023 ini BPBL Lombok akan menyusun usulan penghapusan barang dan melakukan penertiban barang milik negara yang telah diadakan.

IKU ini belum dapat dibandingkan dengan UPT lainnya dan tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu karena capaian akan dihitung pada akhir tahun. Adapun tampilan secara singkat atas capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkup Satker BPBL Lombok adalah sebagai berikut :

Tabel 34. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkup Satker BPBL Lombok

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok										
Nama Indikator : Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkup Satker BPBL Lombok										
Triwulan I Tahun 2023 Realisa			Realisasi	Perbandingan		Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024			
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I Tahun 2022	Realisasi TW I 2023	Target 2023	Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra		
0	0	0.00%	0	0	77.5	0.00%	72.5	0.00		

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini dan permasalahan pada Triwulan I Tahun 2023 adalah adanya sebagian barang-barang yang dalam kondisi rusak berat dan perlu untuk diusulkan penghapusan berlokasi di instalasi Gerupuk, Lombok Tengah,

sehingga tindak lanjut ke depannya adalah memindahkan barang-barang rusak berat yang berada di gerupuk ke sekotong untuk dilakukan penghapusan.

24. IKU Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan data KUSUKA (%)

Persentase pelaku usaha budidaya ikan yang terintegrasi KUSUKA, merupakan penilaian atas capaian pendataan pelaku usaha yang telah terdaftar di database KUSUKA dengan status submit valid dan revisi. Pendataan pelaku usaha bertujuan untuk mengumpulkan/updating data pelaku usaha budidaya ikan. Pendataan KUSUKA dihitung mulai 1 Januari s.d. 31 Desember 2023, dengan baseline data hasil pendataan terakhir tahun 2022 (31 Desember 2022).

IKU ini merupakan IKU Baru dimana pada Tahun 2022 tidak ada Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan data KUSUKA, namun pada Tahun 2023 ini BPBL Lombok mendapat tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 telah dilaksanakan pengenalan aplikasi KUSUKA melalui zoom meeting.

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan UPT lainnya karena capaian pada akhir tahun dan tidak dapat dibandingkan dengan IKU tahun sebelumnya karena tahun 2022 tidak ada IKU Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan data KUSUKA. Adapun tampilan secara singkat atas capaian IKU Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan data KUSUKA adalah sebagai berikut:

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Nama Indikator: Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan data KUSUKA Realisasi RENSTRA 2020-2024 Triwulan I Tahun 2023 Realisasi Perbandingan Terhadap Realisasi TW I 2023 Realisasi Target 2023 Target dibandingkan TW I Triwulan terhadap Realisasi Target Capaian Tahunan Target 2024

Tahun 2022

Tabel 35. Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi

0.00%

0

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini dan permasalahan pada Triwulan I Tahun 2023 adalah belum adanya penginputan data pada Aplikasi KUSUKA dan masih belum bisa digunakan dengan user id yang telah diberikan per UPT, sehingga tindak lanjut ke

2022

0

(%)

0.00%

target akhir

0.00

renstra

80

depannya adalah berkoordinasi dengan TIM DJPB dan PUSDATIN terkait kendala pada Aplikasi KUSUKA.

25. IKU Indeks pengelolaan kepegawaian

IKU indeks Pengelolaan pegawai adalah proses pengelolaan pegawai mulai dari pengangkatan hingga pemberhentian bagi pegawai lingkup BPBL Lombok. Proses tersebut dibagi dalam 3 (tiga) rumpun, yaitu: (1) proses Mutasi, yang terdiri dari proses pengangkatan CANS, pengangkatan CPNS menjadi PNS, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengangkatan pertama dalam jabatan, perpindahan jabatan, pencantuman gelar pendidikan, proses peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, perpindahan SDM Aparatur dan pemberhentian; (2) proses ketatausahaan, yang terdiri dari proses pembuatan kartu pegawai/istri/suami, proses izin cuti, dan pemberian penghargaan atau sanksi, dan (3) informasi ASN, yang terdiri dari: rekapitulasi kehadiran, perhitungan tunjangan kinerja, pelaksanaan pengambilan sumpah PNS, dan peremajaan data ASN. Indeks pengelolaan kepegawaian merupakan pengukuran kualitas proses pengelolaan pegawai, yang menyatakan tingkat penyimpangan proses dalam standar mutu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IKU ini merupakan IKU Baru dimana pada Tahun 2022 tidak ada penilaian indeks pengelolaan kepegawaian, namun pada Tahun 2023 ini dilakukan penilaian indeks pengelolaan kepegawaian tersebut.

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan UPT lainnya karena capaian pada akhir tahun dan tidak dapat dibandingkan dengan IKU tahun sebelumnya karena tahun 2022 tidak ada IKU indeks pengelolaan kepegawaian. Adapun tampilan secara singkat atas capaian IKU indeks pengelolaan kepegawaian adalah sebagai berikut:

Tabel 36. Indeks Pengelolaan kepegawaian

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok										
Nama Indikator :indeks pengelolaan kepegawaian										
Triwulan I Tahun 2023 Realisas			Realisasi	Perbandingan		Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024			
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I Tahun 2022	Realisasi TW I 2023	dibandingkan TW I	dibandingkan TW I	Target 2023	Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
0	0	0.00%	0	0	3	0.00%	3	0.00		

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini dan Permasalahan pada
Triwulan I Tahun 2023 adalah Belum disiplinnya ASN BPBL Lombok

69

dalam mendokumentasikan berkas-berkas terkait kepegawaian dalam bentuk soft copy (file), yang menjadikan faktor penghambat dalam pengusulan berkas kenaikan pangkat ataupun hal lainnya, sehingga tindak lanjut ke depannya adalah menyarankan kepada seluruh ASN BPBL Lombok agar memiliki softcopy dari semua berkas kepegawaian dan disimpan pada google drive, my sapk-BKN ataupun e-pegawai KKP

26. IKU Nilai Pengawasan kearsipan;

Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Pada Tahun 2022 terdapat kendala yaitu belum pahamnya ASN yang mengelola kerasipan dalam pengelolaan dan penyimpanan arsip dan surat sehingga pada Tahun 2023 ini BPBL Lombok mengupayakan untuk meningkatkan kompetensi pengelola kearsipan dalam mengelola arsip di BPBL Lombok.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, BPBL Lombok secara rutin membuat rekapitulasi surat masuk dan surat keluar dan melakukan pendataan jumlah arsip yang ada baik surat maupun dokumen lainnya.

IKU ini belum dapat dibandingkan dengan UPT lainnya dan tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu karena capaian akan dihitung pada akhir tahun. Adapun tampilan secara singkat atas capaian nilai pengawasan kearsipan adalah sebagai berikut :

Tabel 37. Nilai Pengawasan Kearsipan

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok										
Nama Indikator :Nilai Pengawasan kearsipan										
Triwulan I Tahun 2023 Realisasi			Realisasi	Perbandingan		Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024			
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I Tahun 2022	Realisasi TW I 2023	Target 2023	Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra		
0	0	0.00%	0	0	75	0.00%	75	0.00		

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini dan permasalahan pada Triwulan I Tahun 2023 adalah terjadinya kesalahan prosedur dalam pengoperasionalan e-Layar yang berimplikasi pada tidak terkirimnya surat yang telah di TTDE ke tujuan sehingga tindak lanjut ke depannya adalah mmelakukan konsultasi dengan pihak kesekretariatan DJPB dan juga PUSDATIN dalam pengoperasian e-layar/ monitoring surat masuk dan keluar

3.3. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dalam membiayai program peningkatan produksi perikanan budidaya laut mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. **25.088.141.000** (Dua Puluh Lima Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Satu ribu rupiah) dan dari dana yang dialokasikan tersebut, sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp 3.017.542.743 atau 12,03% dari pagu.



Gambar 14. Screenshot aplikasi OMSPAN

3.4. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi didefinisikan sebagi suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Berikut ini adalah hasil efisiensi anggaran di BPBL Lombok berdasarkan aplikasi Smart DJA:



Gambar 14. Hasil efisiensi berdasarkan aplikasi SMART DJA

Berdasarkan hasil tersebut, dapat kita ketahui bahwa nilai efisiensi BPBL Lombok adalah 100

BAB 4. PENUTUP

Laporan Kinerja BPBL Lombok Triwulan I Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Pada Triwulan I Tahun 2023, hasil pengukuran dan analisa yang dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif pada seluruh indikator-indikator utama (IKU) yang menjadi target BPBL Lombok didapatkan hasil dari total 26 IKU, sebanyak 6 indikator kinerja memenuhi target dengan realisasi >100%.

Selanjutnya, dalam mempercepat dan meningkatkan kinerja BPBL Lombok di tahun-tahun kedepan beberapa upaya-upaya konkrit yang dapat dilakukan, antara lain: (i) mengoptimalisasi kegiatan bantuan benih dan bantuan calon induk supaya tercapai target yang telah ditetapkan; (ii) mengadakan rapat secara berkala untuk memonitoring target triwulan berikutnya dan (iv) mendorong pengoperasian sarana instalasi budidaya lobster di dusun telong elong, kabupaten Lombok Timur.

Akhirnya, Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran capaian-capaian output dari IKU yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) antara Dirjen Perikanan Budidaya dan Kepala BPBL Lombok. Lebih lanjut lagi, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukkan/ input dalam merumuskan kebijakan baik di level UPT maupun di tingkatan yang lebih tinggi (level pusat) di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) BPBL Lombok Triwulan I Tahun 2023 ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.